

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara empiris, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran yang tergolong tinggi di tingkat global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menurut jenis kelamin dan tempat tinggal pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 4,94%. Kemudian pada bulan Februari tahun 2021 meningkat 1,31%, sehingga TPT Indonesia menjadi 6,26%. Sedangkan TPT pada bulan Februari 2022 mencapai 5,83% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 144,01 juta orang. Persentase angkatan kerja di Indonesia pada bulan Februari 2022 naik 4,20 juta orang dibandingkan tahun 2021 ((BPS), 2022). Perhitungan tingkat pengangguran tersebut dapat dilihat dari selisih antara jumlah angkatan kerja dengan banyaknya tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi faktor mendasar yang berpengaruh terhadap rendahnya kesejahteraan penduduk.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka BPS Ketenagakerjaan Indonesia

Persentase Data Pengangguran Terbuka di Indonesia		
Februari 2020	Februari 2021	Februari 2022
4,94%	6,26%	5,83%

Sumber: BPS Ketenagakerjaan Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,55% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kenaikan tersebut terjadi karena penduduk usia kerja di Indonesia terdampak Covid-19 sebesar 5,53% dari total 208,54 juta jiwa. Meskipun demikian, TPT di Indonesia kemudian mengalami penurunan 0,43% pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara bertahap mampu mengurangi angka pengangguran, meskipun jumlah tersebut sebenarnya masih tergolong tinggi. Bilamana dilihat dari ruang lingkup yang lebih

sempit lagi, tingginya angka pengangguran masih menjadi persoalan krusial bagi Provinsi Jawa Tengah. Tercatat bahwa TPT Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 6,48%. Tingkat pengangguran tersebut mengalami penurunan sebesar 0,53% pada tahun 2021, sehingga TPT Jawa Tengah menjadi 5,95% (Tengah, 2022).

Adapun salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan terkait maraknya kasus pengangguran terjadi di Kabupaten Kendal. Angka pengangguran di Kendal meningkat drastis pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Kendal pada tahun 2019 meningkat kurang lebih mencapai 60.000 jiwa yang tergolong penduduk usia kerja dengan persentase yang semula 6,26% meningkat 1,3% menjadi 7,56%. Pada bulan Februari tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal menurun dari tahun sebelumnya dengan persentase pengangguran sebesar 5,75%. Penurunan jumlah pengangguran tersebut sebesar 1,8% jika dibandingkan pada Februari 2021 ((BPS), 2022). Seyogianya persentase angka pengangguran akan mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Oleh karena itu, adanya peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan di Kabupaten Kendal harus diantisipasi dengan adanya peran aktif dari pemerintah setempat untuk merumuskan regulasi melalui skema analisis yang tepat, sehingga penerapan kebijakan tersebut dapat berhasil dalam meminimalkan jumlah pengangguran.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kendal

<u>Data Pengangguran di Kabupaten Kendal dalam Persen</u>			
<u>Februari 2019</u>	<u>Februari 2020</u>	<u>Februari 2021</u>	<u>Februari 2022</u>
<u>6,26%</u>	<u>7,56%</u>	<u>7,55%</u>	<u>5,75%</u>

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Secara teoritis, pengangguran telah menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan

pengangguran dapat berpengaruh terhadap munculnya kejahatan sosial yang lebih berbahaya seperti pencurian, perampokan, penodongan, jual-beli manusia dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari kaca mata yang lebih luas, dampak dari pengangguran akan menjadi kuman bahkan penyakit sosial yang relatif dapat menyebar dengan cepat dan berisiko tinggi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia, harkat, martabat dan harga diri manusia. Bilamana pengangguran tidak segera diatasi maka dapat memicu timbulnya kerawanan sosial yang berpotensi meningkatkan jumlah kemiskinan. Oleh karena itu, permasalahan terkait pengangguran harus segera diatasi agar penyebab dari berbagai macam patologi sosial dalam masyarakat dapat berkurang (Ishak, 2018).

Persoalan mengenai tingginya angka pengangguran menjadi masalah yang krusial karena dapat menghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal itu selaras dengan pendapat Kwik Kian Gie selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) yang menyatakan bahwa:

“Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah yaitu membesarnya jumlah pengangguran” (Gie K. K., 2003).

Berdasarkan pendapat tersebut, tingginya angka pengangguran di suatu negara menjadi persoalan yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal seyogianya berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah berikrar untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk dengan menjamin penduduknya memperoleh penghidupan layak yang dapat dilihat melalui tingginya angkatan kerja yang mampu memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perluasan kesempatan kerja sebagai upaya yang dapat dilakukan

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru agar penduduk usia kerja dapat terserap dengan baik sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang (RI, 2013).

Problematika mengenai pengangguran tersebut dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan angka pengangguran yang tergolong tinggi. Banyaknya jumlah pengangguran di Kendal disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: tidak sepadannya jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja; kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia; tidak meratanya jumlah lapangan pekerjaan yang cenderung berpusat di wilayah tertentu; minimnya informasi yang dimiliki oleh pencari kerja karena tidak mempunyai akses untuk mengetahui peluang pekerjaan; serta belum optimalnya peran dan upaya dari pemerintah Kendal dalam meminimalkan pengangguran karena kurangnya pelatihan untuk meningkatkan *softskill* dari para pencari kerja (Ishak, 2018). Berdasarkan faktor-faktor tersebut menyebabkan pengangguran sebagai permasalahan yang sulit untuk dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan jumlah penduduk Kabupaten Kendal yang seiring berjalannya waktu akan senantiasa bertambah sehingga memicu bertambahnya jumlah pencari kerja. Apabila angkatan kerja yang semakin bertambah tidak terserap dalam lapangan pekerjaan maka akan masuk ke golongan orang-orang yang menganggur baru sehingga menambah persentase jumlah pengangguran di Kendal (Sutawijaya, 2012). Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah, diperlukan peran aktif dari pemerintah melalui regulasi yang tepat untuk mengantisipasi sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Sebagai *figure* kelembagaan, pemerintah Kabupaten Kendal, utamanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker Kendal) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan

otoritas dan tanggung jawabnya untuk merumuskan upaya penanganan dalam mengatasi pengangguran.

Dengan berbekal pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal menciptakan aplikasi “Kendal Karier” sebagai upaya untuk meminimalkan tingginya angka pengangguran di Kendal. Adapun aplikasi “Kendal Karier” merupakan suatu platform digital yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang berguna bagi masyarakat Kendal yang sedang/hendak mencari pekerjaan. Segala bentuk lowongan pekerjaan yang disediakan oleh Perseroan Terbatas (PT) beserta klasifikasinya telah tercantum dalam aplikasi yang dapat diunduh melalui *Play Store* dan dapat diakses melalui *website*. Ketika pemerintah setempat mengambil kebijakan untuk menerapkan aplikasi “Kendal Karier”, tentu keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan matang. Setelah diterapkan sebagai suatu kebijakan dalam sistem pelayanan publik, informasi mengenai penerapan aplikasi “Kendal Karier” harus tersalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat agar implementasi dari aplikasi tersebut sesuai dengan tujuan awal untuk mengurangi angka pengangguran di Kendal.

Proses penyebaran informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier” di dalam tatanan masyarakat tentu memiliki peran penting agar kebermanfaatan aplikasi tersebut dirasakan oleh masyarakat Kendal. Namun, proses tersebut mengalami beberapa tantangan. Meskipun telah menerapkan aplikasi “Kendal Karier” yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meminimalkan pengangguran di Kendal, akan tetapi berbagai rentetan persoalan masih menyelimuti pemerintah setempat terkait komunikasi kebijakan dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier”. Apakah informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau tidak. Hal itu perlu untuk diteliti lebih mendalam karena berkaitan dengan nilai kebermanfaatan aplikasi “Kendal

Karier” bagi masyarakat Kendal. Selain itu, dari sisi kemudahan akses dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” juga perlu dianalisis secara detail. Dalam hal ini, penelitian ini akan menganalisis apakah aplikasi ini mampu membantu masyarakat Kendal untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat atau tidak. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji mengenai persoalan tersebut secara lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menyatakan bahwa masih terdapat rentetan persoalan dalam penerapan aplikasi Kendal Karier, utamanya terkait komunikasi kebijakan dan kemudahan akses, untuk itu peneliti akan menganalisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi Kendal Karier. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan yang terjalin dalam implementasi kebijakan penurunan pengangguran melalui aplikasi “Kendal Karier” di Kabupaten Kendal?
2. Apakah aksesibilitas informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier” memiliki peran untuk mempercepat masyarakat dalam memperoleh pekerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini dititikberatkan untuk:

1. Untuk menganalisis komunikasi kebijakan yang terjalin dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier”.
2. Untuk menganalisis kemudahan akses atau peran dari aplikasi “Kendal Karier” dalam mempercepat masyarakat Kabupaten Kendal untuk memperoleh pekerjaan. Melalui penelitian ini dapat dikaji dengan adanya aplikasi “Kendal Karier” apakah berdampak terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan baru terkait komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan kebijakan publik yang terintegrasi melalui digital terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari oleh penulis di dalam perkuliahan. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi penelitian sebelumnya dan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian serupa berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian mengenai analisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier”, diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak, baik pemerintah; masyarakat; swasta; maupun mahasiswa. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melanjutkan operasionalisasi pelayanan publik melalui digital berupa penerapan aplikasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki problematika yang sedang/kemungkinan akan terjadi di masa berikutnya, sehingga komunikasi kebijakan dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” maupun pelayanan publik lain ke depannya dapat berjalan secara optimal dan maksimal.

1.4.3 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa lainnya dan dapat memberikan sumbangan bagi kajian studi di bidang politik dan pemerintahan. Adapun manfaat bagi mahasiswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide penelitian baru yang dapat digunakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian yang belum terjamah dapat diulas kembali dengan penelitian baru sehingga permasalahan mengenai pengangguran dapat tereksplorasi secara masif.

1.4.4 Kegunaan Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Kendal tentang kehadiran aplikasi Kendal Karier. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat karena penyaluran informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier” dapat tersebarluas ke seluruh lapisan Masyarakat Kendal yang membaca penelitian ini. Dari sisi kegunaan aplikasi Kendal Karier, hadirnya aplikasi ini di Kabupaten Kendal disinyalir dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mencari pekerjaan karena telah disediakan wadah yang memuat lowongan pekerjaan. Melalui aplikasi “Kendal Karier”, Masyarakat Kendal dapat mencari informasi terkait pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dari berbagai macam perusahaan yang dapat diselaraskan dengan kemampuan setiap individu. Diharapkan dengan adanya aplikasi “Kendal Karier” dapat membantu memecahkan dan mengurangi persoalan pengangguran di Kabupaten Kendal.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan karya tulis ini, penulis membandingkannya dengan berbagai *literature* yang telah ditulis oleh peneliti lain yang membahas terkait persoalan serupa. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan karya tulis ini dengan peneliti sebelumnya tentang komunikasi kebijakan, aksesibilitas informasi penerapan aplikasi dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran seperti beberapa kajian berikut. *Pertama*, penelitian karya Haryati tentang *Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau* (Hayati, 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dalam mengurangi pengangguran di perkotaan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terjadi karena masih adanya kenaikan angka pengangguran yang terjadi setiap tahunnya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kedua, penelitian karya Rahmawati yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pengangguran: Suatu Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo* (Rahmawati, 2018). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi pengangguran belum sepenuhnya efektif karena beberapa faktor seperti anggaran yang kurang memadai, masih rendahnya keterampilan masyarakat, pelaksana kebijakan yang belum mampu memproduksi kebijakan dengan tepat, serta sistem *database* yang kurang optimal sehingga belum mampu mendorong penurunan angka pengangguran di Sidoarjo. Dalam melakukan kajian, peneliti mencari data yang berasal dari informan

terkait, tempat, peristiwa, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mencari data penelitian.

Ketiga, penelitian karya Dayan Iqwana Silangit yang berjudul *Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kabupaten Siak Tahun 2017-2020* (Silangit, 2022). Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagian besar telah berjalan efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Dinas terkait menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta di bidang industri serta melakukan program penempatan kerja melalui pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui proses wawancara dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Keempat, penelitian karya Mariono yang berjudul *Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Angka Pengangguran di Kabupaten Minahasa* (Mariono & dkk, 2017). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dinas Tenaga Kerja Minahasa telah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang telah diterapkan dengan baik melalui adanya peningkatan kompetensi kerja, keterampilan dan keahlian untuk menanggulangi pengangguran. Dinas setempat juga telah menciptakan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Meskipun demikian, peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja maupun masyarakat juga harus ditingkatkan agar angka pengangguran di Kabupaten Minahasa semakin berkurang. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan teknik analisa data sepanjang penelitian mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan penelitian.

Kelima, penelitian karya Suseno tentang *Inovasi Resource Sharing Solusi Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan* (Suseno & dkk, 2021). Dalam rangka mengatasi persoalan pengangguran di Kota Banten, diperlukan *resources sharing innovation* atau inovasi yang lahir dari berbagai sumber daya sebagai jembatan untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak memperoleh pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan mengkaji sumber data dari berbagai literatur, peraturan pemerintah, survei dan diskusi dengan informan yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya.

Keenam, penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon* (Visita, Maulana, & Nugroho, 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Cilegon masih tergolong sangat tinggi akibat rendahnya daya serap dari angkatan kerja. Penelitian ini bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jenis penelitian riset langsung ke lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.

Ketujuh, penelitian tentang *Implementasi Program Job Fair sebagai Upaya Penganggulangan Pengangguran Kabupaten Sidoarjo* (Kamila, 2020). Pengukuran keberhasilan dari program *job fair* di Sidoarjo dikaji berdasarkan teori implementasi menurut Edward III dengan analisis dari sektor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini bersumber dari analisis data menggunakan model interaktif melalui wawancara mendalam terhadap informan. Adapun penentuan informan dilakukan dengan sistem *purposive sampling*. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kedelapan, penelitian tentang *Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kutai Timur* (Parapak, Nur, & Linggi, 2018). Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan baik akan tetapi masih memerlukan informasi terkait kesempatan kerja serta penambahan jumlah instruktur dalam pemberian suatu pelatihan keterampilan dalam pekerjaan. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling* dan *accidental sampling*.

Kesembilan, penelitian terkait *Implementasi E-Government melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi* (Annisa, 2011) oleh Citra Annisa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah telah berjalan dengan baik, namun hubungan antara pemerintah kepada swasta dan masyarakat terlihat belum baik. Bilamana dilihat dari segi sumber daya dan disposisi masih menunjukkan kondisi yang kurang baik karena terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Bursa Kerja *Online*. Meskipun demikian, dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, mayoritas pemerintah daerah setempat hanya melakukan upaya normatif melalui pemberian pelatihan keterampilan kerja tanpa diiringi dengan adanya inovasi baru dan kolaborasi bersama dengan pihak swasta sehingga pengangguran masih menjadi polemik yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun beberapa penelitian di atas ada yang menunjukkan keberhasilan pemerintah setempat dalam menanggulangi pengangguran, akan tetapi penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut belum menunjukkan adanya pembaruan melalui bentuk

inovasi pelayanan pemerintah yang terintegrasi secara digital dalam mengatasi pengangguran. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil langkah baru yang berbeda dari daerah lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penerapan aplikasi “Kendal Karier” sebagai bentuk pelayanan publik yang menjadi salah satu terobosan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kendal. Selain itu, pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya masih melingkupi implementasi kebijakan secara general, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih lanjut menganalisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier”. Oleh karena itu, *lanskap* penelitian ini akan berbeda dari peneliti sebelumnya karena akan mengkaji secara lebih lanjut terkait persoalan tersebut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Komunikasi Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan, dibutuhkan usaha untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan kebijakan melalui variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan tersebut. Salah satu variabel penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi kebijakan. Abdul Wahab mengemukakan bahwa pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu struktur yang terjadi dalam tubuh pemerintahan yang diterjemahkan dalam penyampaian pesan, program, dan gagasan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Wahab, 2017). Berdasarkan studi kebijakan publik, komunikasi kebijakan merupakan hal krusial dalam proses penerapan regulasi sebagai salah satu tolak ukur pencapaian tujuan kebijakan. Selaras dengan pernyataan tersebut, George C. Edward III dalam Ismail Nawawi menyebut bahwa komunikasi menjadi variabel pertama yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan, yang diikuti dengan tiga variabel lain yaitu sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi (Nawawi I. , 2009). Keempat variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. **Komunikasi** (*communication*), merupakan variabel yang sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari penerapan kebijakan publik. Dalam hal ini, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila para pembuat kebijakan mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan secara jelas. Komunikasi ini penting untuk dilakukan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat diinformasikan kepada kelompok sasaran dengan tepat sehingga mampu mengurangi distorsi dalam implementasi kebijakan. Bilamana penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak dipaparkan dengan jelas, maka informasi mengenai kebijakan tersebut tidak diketahui oleh kelompok sasaran bahkan memiliki kemungkinan mendapatkan penolakan dari kelompok yang bersangkutan.

Dalam suatu organisasi publik, komunikasi merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Hal itu terjadi karena dalam komunikasi kebijakan dapat memicu timbulnya interpretasi yang berbeda dari masing-masing penerima kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut, suatu kebijakan harus mempunyai kejelasan tujuan dan ukuran kebijakan yang dikomunikasikan dengan tepat oleh pelaksana kebijakan. Selain itu, keseragaman dan konsistensi dari tujuan dan ukuran kebijakan juga harus dikomunikasikan agar pelaksana kebijakan mengetahui secara rinci tentang penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mengukur keberhasilan komunikasi kebijakan, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. **Penyaluran.** Transmisi informasi yang diberikan dengan baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan kerap kali terjadi karena banyaknya tingkatan dalam birokrasi sehingga proses komunikasi mengalami distorsi di tengah jalan. Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan diperlukan penyaluran informasi yang baik antar stakeholder yang terlibat agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
 - b. **Kejelasan.** Proses komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas sehingga tidak membingungkan dan bermakna ganda/ambigu. Kejelasan penyampaian informasi dalam penerapan kebijakan menjadi salah satu kunci agar pelaksana kebijakan, target sasaran dan pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut memahami kebijakan dengan baik;
 - c. **Konsistensi.** Perintah yang diberikan oleh pelaksana kebijakan melalui bentuk komunikasi kebijakan harus dilakukan secara konsisten (tidak berubah-ubah) dan jelas. Konsistensi dalam penyampaian informasi merupakan hal penting sebagai salah satu bentuk komitmen yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam menerapkan suatu regulasi.
2. **Sumber daya.** Meskipun sasaran, tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang baik maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam rangka menunjang implementasi kebijakan, sumber daya merupakan variabel penting. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya dapat tertulis dalam dokumen saja sehingga tidak dapat diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah dalam masyarakat. Untuk itu, sumber daya menempati posisi penting sebagai *input* dalam organisasi yang berimplikasi

terhadap nilai ekonomis yang berhubungan dengan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan. Selain itu, sumber daya dalam penerapan kebijakan juga berkaitan dengan nilai teknologis yang bertalian dengan kemampuan organisasi untuk melakukan transformasi menggunakan kebijakan yang diterapkan (Tachjan, 2006).

Adapun Edward III dalam Nawawi mengemukakan bahwa sumberdaya menjadi variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauhmana sumberdaya mempengaruhi penerapan kebijakan dapat diukur menggunakan indikator berikut:

- a. **Sumber Daya Manusia (SDM) atau staf.** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dari pelaksana kebijakan. Semakin kapabel dan kompeten pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya, berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan kurang memadai akan berdampak buruk terhadap keberjalanan kebijakan. Untuk itu, kualitas dan kuantitas staf harus dipertimbangkan dengan matang agar kebijakan dapat berjalan dengan baik;
- b. **Informasi.** Dalam menerapkan suatu kebijakan, terdapat dua bentuk informasi yang tersaji. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, pihak pelaksana kebijakan harus mengetahui hal apa saja yang mereka lakukan ketika diberi perintah. *Kedua*, informasi terkait data dukung dari kepatuhan pelaksana terhadap regulasi yang telah ditetapkan;
- c. **Wewenang.** Pada umumnya elemen ini bersifat formal agar perintah dari kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewenangan

sendiri merupakan bentuk otoritas bagi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Bilamana tidak ada wewenang, maka implementor tidak memiliki legitimasi di mata publik;

d. Fasilitas. Penyediaan fasilitas dapat berupa fasilitas fisik maupun non fisik (sarana dan prasarana) sebagai pendukung dari implementasi kebijakan.

3. **Disposisi** atau yang biasa disebut dengan sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kecenderungan penerimaan atau sikap positif dari pelaksana kebijakan akan menghasilkan dukungan besar terhadap implementasi kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan, kendala serius dalam penerapan kebijakan akan terjadi. Untuk itu, penerimaan pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika para pelaksana kebijakan bersikap positif terhadap suatu kebijakan, dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan untuk mengimplementasikan kebijakan sehingga praktik kebijakan tersebut tidak menjadi bias. Adapun beberapa hal yang harus dicermati berdasarkan variabel disposisi menurut Edward III dalam Nawawi (Edward III G. d., 1980) yaitu:

a. Pengangkatan birokrat. Sikap dari para pelaksana kebijakan akan mengalami hambatan dalam menerapkan kebijakan ketika mereka tidak memiliki dedikasi terhadap regulasi yang ditetapkan. Untuk itu, diperlukan pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan yang baik sehingga bertanggung jawab atas tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan;

b. Insentif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecenderungan pelaksana kebijakan yaitu melakukan manipulasi insentif. Hal ini dilakukan agar para pelaksana kebijakan dapat bekerja dengan lebih giat dalam melaksanakan perintah. Pemberian insentif ini dapat dilakukan melalui penambahan keuntungan atau biaya tertentu bagi para pelaksana kebijakan sebagai bentuk imbalan jasa untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi agar dapat lebih prima dalam menjalankan tugasnya.

4. **Struktur birokrasi.** Menurut Edward III dalam Nawawi, mengemukakan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi juga oleh struktur birokrasi. Mengingat bahwa kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama yang melibatkan orang banyak dalam rangka mengatur berbagai elemen dalam penerapan kebijakan, untuk itu diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar terjalin koordinasi yang baik. Terdapat dua hal yang dapat meningkatkan kinerja dari struktur birokrasi agar berjalan menuju arah yang lebih baik, kedua hal tersebut meliputi:

a. *Standard Operating Procedure (SOP)*, setiap pelaksana kebijakan dituntut untuk mengerjakan kegiatan rutin dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan standar tertentu yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas dari para pelaksana kegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku;

b. *Fragmentasi*, merupakan upaya yang dilakukan untuk menyebarkan tanggung jawab setiap kegiatan sesuai dengan tupoksi dan unit kerja yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan pendapat Edward III dalam Nawawi, dapat digaris bawahi bahwa para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memerlukan proses komunikasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipahami dengan jelas. Komunikasi disini berarti bahwa proses transformasi kebijakan tidak hanya berlaku kepada pelaku kebijakan, melainkan kepada kelompok sasaran maupun lembaga tertentu yang memiliki *consent* dalam permasalahan kebijakan tersebut. Melalui proses komunikasi kebijakan, substansi kebijakan yang meliputi tujuan, sasaran dan arah kebijakan dapat diidentifikasi secara jelas. Ketika substansi kebijakan telah diketahui dengan tepat maka proses penyusunan SOP juga semakin jelas.

Selain itu, dari sisi sumber daya (baik itu manusia, informasi, wewenang, fasilitas) dari kebijakan juga dapat ditentukan dengan mudah melalui proses komunikasi yang tepat. Efektivitas dan intensitas komunikasi kebijakan akan memerlukan figur pemimpin birokrasi yang mempunyai tingkat profesionalitas tinggi yang didukung dengan struktur birokrasi yang baik. Struktur birokrasi ini berpengaruh terhadap efektivitas dan intensitas komunikasi kebijakan. Tidak hanya itu, struktur dalam birokrasi juga memiliki pengaruh terhadap tingkat disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Dengan demikian, keempat variabel yang dijelaskan oleh Edward dalam Nawawi ini berpengaruh terhadap keberhasilan dari penerapan kebijakan (Edward III G. d., 1980).

1.6.2. Aksesibilitas Informasi terkait Ketenagakerjaan

Aksesibilitas atau yang dalam Bahasa Inggris *accessibility* mempunyai arti kemudahan dalam mencapai sesuatu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas merupakan suatu hal yang dapat dijadikan akses;

sesuatu yang dapat dikaitkan; atau keterkaitan suatu hal (KBBI, Jakarta). Wojowasito (1991) mengemukakan bahwa aksesibilitas merupakan hal yang mudah untuk digapai atau dicapai. Dalam hal ini, aksesibilitas tidak hanya berarti kesediaan akan suatu hal akan tetapi juga berarti kemudahan dalam mencapai kesediaan tersebut (Wojowasito, 1991).

Sheth dan Sisodia dalam Christy mendefinisikan aksesibilitas sebagai ukuran terkait sejauh mana pengguna atau masyarakat mampu memperoleh dan/atau menggunakan produk dengan mudah (Christy S. d., 2019). Keterjangkauan atau aksesibilitas ini mempunyai dua dimensi, meliputi:

1. Ketersediaan yang merujuk pada faktor-faktor pasokan terhadap permintaan produk atau layanan;
2. Kenyamanan yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti waktu dan upaya untuk memperoleh kemudahan layanan.

Menurut pendapat Carr dalam Christy, aksesibilitas termasuk dalam hak seseorang untuk menggunakan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, aksesibilitas berkaitan dengan derajat kemudahan seseorang terhadap objek, pelayanan maupun lingkungan tertentu (Christy C. d., 2019). Aksesibilitas atau yang kerap disebut dengan istilah keterjangkauan merupakan suatu bentuk kemudahan terhadap suatu layanan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, aksesibilitas dapat dihubungkan dengan kemudahan individu atau masyarakat untuk mengakses layanan publik.

Salah satu faktor pendorong kemudahan akses informasi terjadi karena adanya transformasi digital. Transmisi informasi melalui *network telecommunication system* seperti internet ini bisa dilakukan untuk mengatasi

keterbatasan ruang, jarak dan waktu dengan lebih baik dan rinci dimanapun dan kapanpun (Koswara, 2018). Kehadiran informasi melalui digital memberikan kemudahan karena dapat diakses melalui berbagai *platform* berbasis internet, seperti gawai, komputer, laptop dan lainnya. Dengan adanya transmisi dan transformasi informasi berbentuk digital memudahkan penyaluran informasi bagi masyarakat.

Transformasi informasi berbasis digital ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat, salah satunya seperti persoalan pengangguran maupun ketenagakerjaan. Persoalan tentang tingginya angka pengangguran dapat diatasi dengan penerapan sistem yang terintegrasi dengan digital, seperti tersedianya informasi tentang lowongan pekerjaan yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Kemudahan untuk mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat membantu masyarakat dalam mencari lowongan pekerjaan yang tersedia.

Pemanfaatan media digital dalam mengatasi persoalan pengangguran menjadi inovasi baru bagi pemerintah. Masyarakat yang menganggur dapat mencari informasi tentang kualifikasi pekerjaan yang cocok dengan dirinya melalui platform tersebut. Salah satu media yang di *launching* oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu aplikasi Kendal Karier. Masyarakat Kendal yang sedang mencari pekerjaan dapat mengakses aplikasi tersebut untuk menemukan pekerjaan.

Semua orang sejatinya tidak mengharapkan dirinya untuk menjadi pengangguran, setiap orang tentu menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk menyongsong keberlangsungan hidup. Namun,

di era sekarang ini persaingan kerja semakin ketat, oleh karenanya dibutuhkan peran aktif melalui bentuk kolaborasi antara tiga *stakeholder* yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam rangka meminimalkan jumlah pengangguran, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki kewenangan dalam membuat regulasi untuk menguraikan permasalahan pengangguran. Selain itu, dari pihak swasta juga memiliki andil besar sebagai aktor yang menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus terlibat aktif sebagai objek dari permasalahan pengangguran. Masyarakat sebagai target sasaran juga harus berperan dalam meminimalkan angka pengangguran yang tinggi dengan berusaha untuk mengasah nilai tambah pada dirinya agar memiliki keterampilan yang berbeda dari standar masyarakat pada umumnya sehingga dapat keluar dari belenggu pengangguran.

Adapun makna dari pengangguran sendiri merupakan kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam usia angkatan kerja (15-64 tahun) yang ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2006). Berdasarkan indikator ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja akan tetapi sedang mencari pekerjaan; sedang mempersiapkan diri untuk membuka usaha baru; atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena telah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja (Akadun B. P., 2021). Lebih lanjut, Murni menyebutkan bahwa pengangguran merupakan orang yang usianya berada dalam kategori angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (Murnia, 2009). Dalam hal ini, pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan tenaga kerja, dimana Payaman J. Simanjuntak menyatakan bahwa tenaga kerja

merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan atau sedang melakukan kegiatan lain (Payaman, 1985).

Badan Pusat Statistika lebih lanjut memaparkan bahwa penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun terbagi menjadi kelompok angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja. Dikatakan sebagai angkatan kerja (AK) bila mana penduduk yang tergolong angkatan kerja melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan yang dilakukannya dengan bekerja yang terhitung paling sedikit satu jam perhari secara berkelanjutan dalam kurun waktu minimal seminggu. Sedangkan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak sedang mencari pekerjaan karena alasan tertentu, seperti penduduk yang masih sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain sebagainya. Berdasarkan pernyataan tersebut, Basuki dalam Dayen Iqwana Silangit menambahkan bahwa tidak semua penduduk yang berusia di antara 15 hingga 64 tahun termasuk ke dalam golongan angkatan kerja (Silangit, 2022). Hal tersebut terjadi karena kategori penduduk yang pengangguran itu biasanya tidak memiliki pekerjaan selama usia kerja atau masa kerjanya (Putong, 2003). Oleh karena itu, pengangguran dapat diukur dari persentase tenaga kerja yang menganggur.

Menurut pendapat Franita, pengangguran terbagi dalam beberapa jenis yang meliputi, pengangguran terselubung; setengah menganggur; dan pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung terjadi ketika seseorang yang tidak bekerja secara maksimal dikarenakan oleh alasan dan kondisi tertentu. Kemudian berkaitan dengan setengah menganggur berarti bahwa orang tersebut memiliki pekerjaan akan tetapi telah bekerja kurang dari 35 jam per-minggu. Sedangkan pengangguran terbuka merupakan keadaan dimana seseorang benar-

benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali (Franita, 2016). Menurut pendapat Todaro dan Smith, pengangguran dibagi berdasarkan penyebab yang meliputi pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklikal dan pengangguran musiman (Todaro & Smith, 2015). Fauziah menambahkan bahwa pengangguran juga dapat terjadi karena kemajuan teknologi, hal ini dapat terjadi karena banyak perusahaan yang telah menerapkan teknologi dalam proses produksi sehingga kemajuan tersebut mengurangi jumlah penyerapan tenaga kerja yang kemudian tergantikan dengan teknologi buatan yang lebih canggih (Fauziah, 2020)

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa banyaknya kasus pengangguran yang terjadi memerlukan penanganan yang serius oleh berbagai pihak. Salah satunya yaitu melalui upaya perluasan lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sektor swasta dan sektor pemerintah. Maraknya kasus pengangguran yang terjadi kemudian menunjukkan suatu fenomena bahwa terdapat sumber daya yang terbuang. Padahal para pengangguran ini memiliki potensi yang tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional negara akan tetapi penganggur tidak dapat melakukan kontribusi tersebut.

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan suatu jawaban sementara menurut pendapat dari peneliti terhadap rumusan masalah dari penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis masih sebatas jawaban teoritis yang belum didasarkan pada fakta-fakta empiris di lapangan yang diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2014). Adapun hipotesis awal dari penelitian ini yaitu:

1. Komunikasi kebijakan dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” berjalan dengan baik antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran kebijakan. Dalam hal ini informasi terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier” tersampaikan kepada Masyarakat Kendal dengan baik. Semakin baik komunikasi kebijakan yang terjalin dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” berpengaruh positif terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal;
2. Semakin mudah aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” akan berpengaruh positif dan berdampak baik terhadap percepatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.

1.8 Variabel Penelitian

1.8.1 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan bentuk variabel yang memberikan pengaruh terhadap suatu keadaan dalam sebuah penelitian. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi Kendal Karier. Penelitian ini membahas tentang analisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi Kendal Karier untuk mengukur sejauh mana masyarakat Kendal mengetahui aplikasi tersebut serta sejauhmana dampak dari kemudahan akses informasi melalui aplikasi Kendal Karier terhadap percepatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.

1.8.2 Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini penurunan angka pengangguran merupakan akibat dari keberhasilan komunikasi kebijakan dan kemudahan akses dalam penerapan aplikasi Kendal Karier. Komunikasi

kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi Kendal Karier merupakan variabel bebas yang dapat memberikan dampak-dampak positif atau negatif terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal.

1.9 Definisi Konsep

Pada definisi konsep, peneliti akan menentukan ruang lingkup dan batasan-batasan dari penelitian berdasarkan konsep penelitian agar permasalahan yang telah ditentukan tidak menyimpang dari pembahasan dalam penelitian ini. Karakteristik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dijabarkan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai berikut:

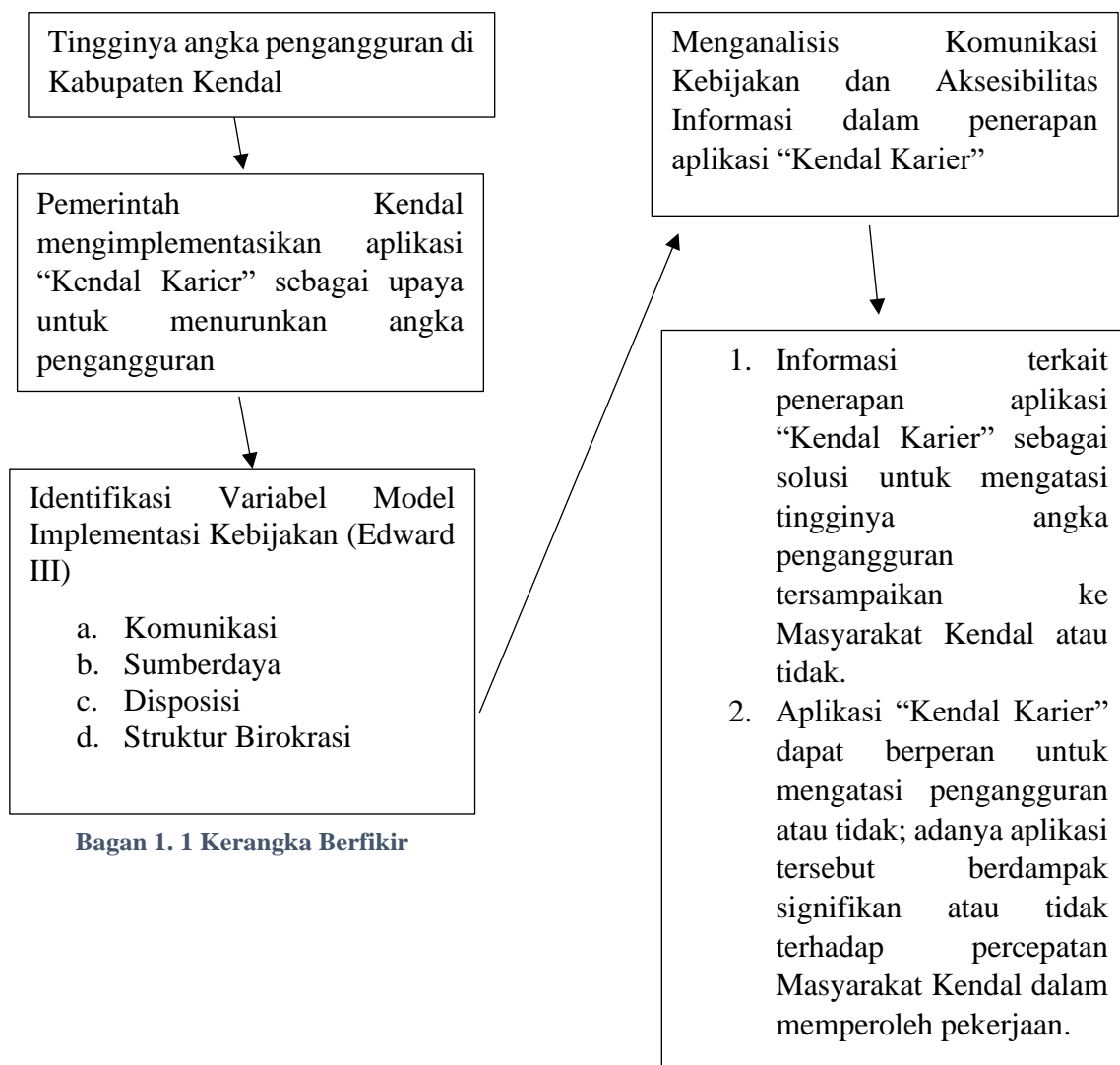
Tabel 1.1 Definisi Konsep dan Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan/Penjelasan	Indikator
1.	Komunikasi	Komunikasi merupakan bentuk penjelawatanan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Para pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan menjalin komunikasi yang baik agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, para pihak yang terlibat yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Masyarakat Kabupaten Kendal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber daya	Sumber daya merupakan faktor penggerak dalam implementasi kebijakan. Sumber daya berperan sebagai <i>input</i> dalam organisasi yang berimplikasi terhadap nilai ekonomis dari kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya berhubungan dengan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan serta nilai teknologis yang bertalian dengan kemampuan organisasi untuk melakukan transformasi menggunakan kebijakan yang diterapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Penerimaan kebijakan dari pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Birokrat 2. Insentif

		kebijakan akan berdampak positif terhadap kebijakan tersebut.	
	Struktur Birokrasi	Dalam rangka mengatur berbagai elemen dalam penerapan kebijakan, diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar terjalin koordinasi yang baik. Susunan birokrasi yang baik sangatlah menunjang keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur 2. Fragmentasi

Masing-masing variabel tersebut akan dikaitkan dengan penerapan aplikasi “Kendal Karier”. Peneliti akan menggunakan teori dan variabel-variabel tersebut sebagai pedoman dalam menganalisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi mengenai penerapan aplikasi “Kendal Karier” oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

1.10 Kerangka Berpikir



Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir

1.11 Metode Penelitian

Sebagai bentuk pemecahan masalah yang ada dalam suatu penelitian, diperlukan upaya penyelidikan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, teratur dan *continue* dalam rangka mengetahui bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan dapat diteliti menggunakan metode penelitian. Dalam proses penelitian, metode merupakan aspek yang penting karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu penelitian, utamanya untuk mengumpulkan data, sebab data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan gambaran dari objek yang diteliti. Hal tersebut selaras dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dapat digunakan untuk mencari data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah atau teknik tertentu yang digunakan untuk mencari atau memperoleh data terkait objek penelitian dalam rangka memecahkan permasalahan dari suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian pada pembahasan berikut ini.

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan data atau fakta tertentu di lapangan. Berdasarkan tipe penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis, mendeskripsikan, meneliti dan menjelaskan suatu permasalahan yang dipelajari dengan apa adanya dan menarik kesimpulan dari fenomena yang telah diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam penerapan aplikasi “Kendal Karier” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Pemahaman masyarakat terkait penerapan aplikasi “Kendal Karier” akan dianalisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian.

1.11.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014), populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mengkaji sebuah penelitian. Adapun populasi yang akan diambil dari penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang tergolong dalam kategori pengangguran maupun masyarakat yang telah mengakses aplikasi “Kendal Karier”. Informasi terkait jumlah pengakses aplikasi tersebut diperoleh berdasarkan data dari *Play Store*, dalam hal ini terdapat 1.000 orang yang telah mengunduh aplikasi tersebut. Masyarakat Kendal yang telah mengunduh aplikasi “Kendal Karier” akan berperan sebagai populasi dalam penelitian ini.

B. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi. Sampel diperlukan dalam proses pengumpulan data kuantitatif karena apabila populasi dalam penelitian besar maka peneliti tidak akan mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sebab adanya keterbatasan, waktu, dana dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi dan digunakan untuk mewakili populasi.

Dalam rangka menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin. Menurut Sugiyono, rumus slovin merupakan perumusan yang digunakan untuk mencari besaran sampel yang dinilai dapat mewakili keseluruhan dari jumlah populasi (Sugiyono, 2014). Rumus slovin dipilih karena jumlah dari populasi

dalam penelitian ini sangat besar, sehingga diperlukan rumus slovin untuk menemukan jumlah minimum sampel dari populasi yang terbatas atau yang disebut dengan *finite population survey*. Pengambilan rumus slovin sesuai dengan teknik sampling dalam penelitian ini yang menggunakan *simple random sampling* dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi dalam penelitian ini. Adapun tujuan utama dari penggunaan rumus slovin yaitu untuk mencari estimasi dari jumlah populasi yang sesuai dengan proporsi dari populasi bukan untuk mencari estimasi rata-rata dari populasi (SampoernaAcademy, 2022). Berikut merupakan rumus pengambilan sampel slovin yang dijelaskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

- N = ukuran populasi
- n = ukuran sampel
- e = toleransi kesalahan yang dapat ditolerir dalam pemilihan anggota sampel dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05

Dengan demikian, sampel yang dapat diambil dari populasi yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{1.000}{1+1.000 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{1.000}{1+1.000 (0,0025)}$$

$$n = \frac{1.000}{1+2,5}$$

$$n = \frac{1.000}{3,5}$$

$$n = 285,71 \approx 286 \text{ jiwa}$$

Jumlah sampel tersebut akan digunakan sebagai responden untuk menganalisis komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam implementasi aplikasi “Kendal Karier”. Sampel dalam penelitian ini termasuk jumlah populasi yang tidak terhingga dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga jumlah sampel sebanyak 286 responden dari masyarakat Kendal dan/atau pengguna aplikasi “Kendal Karier”.

1.12 Teknik Sampling

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan dua teknik sampling yaitu sampel acak sederhana dan sampel insidental. Adapun *simple random sampling* sendiri merupakan salah satu jenis sampel *probability sampling* yang prosesnya berasal dari pengambilan beberapa anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam populasi tersebut. Teknik tersebut dipilih karena peneliti akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi salah satu sampel dalam penelitian ini. Awal mula pemilihan teknik sampel ini berangkat dari beberapa referensi yang menggunakan teknik acak sederhana dengan fokus penelitian yang serupa. Sedangkan *sampling insidental* merupakan salah satu jenis *non probability sampling*, di mana penentuan teknik sampel ini didasarkan pada faktor kebetulan, yaitu siapa saja orang yang bertemu dengan peneliti pada saat proses pengumpulan data dan orang tersebut dianggap cocok untuk menjadi salah satu responden. Adapun penjelasan terkait pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sampel acak sederhana dilakukan terhadap terhadap *user* atau pengguna aplikasi “Kendal Karier” yang termasuk kategori dalam penelitian ini dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi

untuk menjadi sampel penelitian. Dalam hal ini, seluruh populasi dalam penelitian ini mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota sampel tanpa melihat tingkatan atau strata tertentu dari populasi tersebut. Adapun kategori responden yang dapat menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Kabupaten Kendal, tergolong angkatan kerja (usia diatas 17 tahun), pernah dan/belum pernah menggunakan aplikasi Kendal Karier.

Dalam pengambilan sampel acak sederhana, peneliti telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melakukan penelitian ini. Koordinasi dilakukan melalui pendaftaran izin penelitian dengan mengakses *Website Sijeli* yang dikelola oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Proses izin penelitian ini mendapatkan respon positif sehingga mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal selaku dinas yang mengelola Aplikasi Kendal Karier.

Berangkat dari rekomendasi yang telah diberikan, selama proses pengambilan sampel peneliti dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Melalui grup *Whatsapps* yang menghimpun Masyarakat Kendal yang pernah mengikuti pelatihan kerja, Disperinaker membantu peneliti menyebarluaskan kuesioner penelitian pada grup tersebut yang masih aktif. Selain itu, peneliti juga menyebarkan kuesioner penelitian ke grup *whatsapps* peneliti yang berisi kelompok masyarakat yang sesuai dengan kriteria penelitian ini.

- b. Sampel insidental dilakukan kepada Masyarakat Kabupaten Kendal yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti seiring dengan berjalannya proses

penelitian. Sampel ini diambil untuk menutupi kekurangan data dari teknik sampel acak sederhana yang belum memenuhi target. Peneliti mencari responden secara langsung selama proses penelitian di beberapa tempat, khususnya di wilayah Disperinaker dan Perpusda Kendal yang berisi mayoritas masyarakat yang sedang dan/atau telah mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi “Kendal Karier”.

1.13 Jenis dan Sumber Data

1.13.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kuantitatif yang berwujud angka-angka. Data yang tersaji diperoleh dari pengukuran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dalam hal ini, data kuantitatif bersifat objektif yang dapat ditafsirkan oleh semua orang yang termasuk dalam kategori sampel penelitian (Sugiyono, 2014). Metode kuantitatif digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Adapun metode kuantitatif sendiri merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk menguji sasaran teori dengan mengkaji hubungan antar variabel yang dapat diukur dalam beberapa instrumen (Creswell, 2009). Melalui metode penelitian kuantitatif, peneliti akan mengukur berbagai indikator dalam teori yang telah disebutkan. Peneliti menetapkan variabel-variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III berupa komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi terkait penerapan aplikasi Kendal Karier yang dapat berpengaruh terhadap penurunan angka pengangguran. Sehingga akan diperoleh data kuantitatif terkait analisis

komunikasi kebijakan dan aksesibilitas informasi dalam implementasi aplikasi “Kendal Karier” terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kendal.

Berdasarkan metode kuantitatif, peneliti akan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dengan menghubungkan variabel tersebut ke dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan standar-standar validitas dan reliabilitas untuk mengukur keabsahan hasil atau informasi penelitian secara numerik. Adapun strategi yang akan digunakan oleh peneliti kuantitatif yaitu melalui survei dan menyebar kuesioner secara *online* untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

1.13.2 Sumber Data

Adapun penyusunan penelitian ini diperoleh menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada responden yang berpotensi dapat memberikan informasi yang relevan. Data primer ini didapat oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner terstruktur, tertutup dan terbuka terhadap subjek-subjek yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi terkait topik penelitian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan beberapa pengguna aplikasi “Kendal Karier” yang terpilih secara insidental seiring dengan berjalannya proses penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh

melalui sumber literatur, dokumen dan data yang diambil dari suatu instansi atau organisasi. Untuk data sekunder, peneliti akan menggunakan studi literatur, teks atau tulisan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi dan situs pemerintah agar dapat melengkapi data yang telah diterima. Melalui pencarian data sekunder, peneliti dapat mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian.

1.14 Skala Pengukuran

Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti kuantitatif perlu menentukan secara tepat instrumen untuk mengumpulkan data sebagai alat ukur dari nilai variabel yang akan diteliti. Peneliti akan menggunakan instrumen dengan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu fenomena atau kasus sosial yang terjadi yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti sebagai variabel penelitian.

Tabel 1.2 Skala Likert

Penilaian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

1.15 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Berdasarkan penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.15.1 Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data melalui bentuk kuesioner merupakan cara yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada para responden yang telah ditentukan untuk

menjawab pertanyaan tersebut. Kuesioner menjadi salah satu teknik pengumpulan yang efisien bilamana peneliti mengetahui secara pasti variabel yang akan diukur dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner secara *online* kepada masyarakat Kendal dan pengguna Aplikasi “Kendal Karier”.

1.15.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Peneliti kuantitatif akan menggunakan teknik ini untuk menganalisis komunikasi kebijakan, perilaku, proses kerja, aksesibilitas informasi dan gejala-gejala sosial lainnya selama proses penelitian, di mana dalam hal ini peneliti terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, akan tetapi peneliti mengambil jarak terhadap mereka agar informasi yang diberikan sesuai dengan fakta dilapangan.

1.15.3 Dokumentasi

Pengumpulan data ini berbentuk tulisan berupa catatan literatur, buku, berita, media, gambar dan data pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

1.16 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner atau angket yang berisi butir-butir pertanyaan yang diberikan kepada responden (Masyarakat Kabupaten Kendal dan Pengguna Aplikasi Kendal Karier). Penelitian ini menggunakan angket tertutup yang mana responden hanya diminta untuk

memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda pada setiap jawaban. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pertanyaan terbuka sehingga responden dapat memberikan opsi jawaban sesuai dengan pengetahuannya.

1.17 Teknik Analisis data

Sugiyono menyebutkan bahwa analisis data kuantitatif merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data yang berasal dari responden atau sumber data lain telah terkumpul (Sugiyono, 2014). Adapun teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif berupa tabel, grafik, maupun gambar. Analisis data yang dilakukan meliputi:

1.17.1 Editing

Data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan (kuesioner) akan dikumpulkan, ditinjau kembali dan disusun untuk memperbaiki kualitas datanya. Editing diartikan sebagai proses penyuntingan, pemilihan dan penyederhanaan informasi data kasar yang muncul di lapangan. Proses editing data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung untuk mengurangi terjadinya kesalahan.

1.17.2 Codeting

Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan variabel dengan memberikan kode tertentu dari jawaban seluruh responden. Penyajian data dari setiap variabel yang diteliti akan diukur menggunakan perhitungan tertentu untuk menjawab rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Adapun teknik penyajian data yang akan digunakan oleh peneliti kuantitatif yaitu statistik deskriptif, di mana peneliti akan menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Peneliti akan menyajikan data melalui berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram lingkaran atau bentuk lainnya untuk menggambarkan data. Berdasarkan analisis data statistik deskriptif, peneliti kuantitatif akan mencari kuatnya hubungan yang terjalin antar variabel melalui analisis korelasi dengan melakukan prediksi yang telah dilakukan sebelumnya (Sugiyono, 2014).

1.17.3 Tabulasi Data

Setelah data dikelompokkan, proses selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam tabel. Penyajian data melalui tabel bertujuan untuk memudahkan proses pengamatan dan evaluasi. Adapun hasil dari tabulasi data dapat digunakan sebagai gambaran dari hasil penelitian karena data-data yang diperoleh dari lapangan telah tersusun dan terangkum dalam tabel sehingga mudah untuk dipahami.

1.17.4 Analisis Data

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan memberikan penjelasan atau keterangan tertentu menggunakan kalimat agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan bantuan perangkat *computer program* SPSS.

1.17.5 Interpretasi Data

Hasil dari analisis data kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan jelas agar dapat memberikan kesimpulan yang

mudah dipahami. Proses interpretasi data ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci dari makna materi yang dipaparkan.